



KPK Bidik Istri Anas

■ Dugaan Korupsi Proyek Hambalang

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/11) siang.

KPK membidik istri Anas, Attiya Laila, dalam kasus dugaan korupsi proyek Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Ini enggak ada kaitannya dengan Anas Urbaningrum. Yang digeledah adalah tempat atau kediaman Attiya Laila," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Mahfud Suroso, Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, sebagai



“Muncul dugaan-dugaan di tempat yang kita geledah itu. Karena ini kaitannya dengan Mahfud Suroso.”

JOHAN BUDI
Juru Bicara KPK

tersangka baru Hambalang. Sementara Attiya adalah Komisaris PT Dutasari Citralaras. Attiya diduga menyimpan data-data terkait proyek Hambalang.

"Dalam kasus Hambalang kan berproses. Muncul dugaan-dugaan di tempat yang kita geledah itu. Karena ini kaitannya dengan Mahfud Suroso, maka jejak-jejaknya ada di situ," ujar Johan.

Pada proyek Hambalang, perusahaan milik Mahfud adalah subkontraktor KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya, yang menangani pengadaan jasa instalasi kelistrikan.

Mahfud diduga telah melakukan *mark up*. Terlebih dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahfud, disebut menerima uang Rp 63 miliar.

■ Bersambung ke Hal. 7

KPK Bidik Istri Anas

Mahfud dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain Mahfud, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka Hambalang. Mereka adalah mantan Mentora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedy Kusdinar, dan mantan Direktur Operasional PT Adhi-Wika, Teuku Bagus Muhammad Noor.

Sementara terkait penerimaan gratifikasi, KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Nama Anas mencuat setelah terdakwa kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan uang Rp 100 miliar dari pelaksanaan proyek Hambalang mengalir ke Anas melalui Mahfud Suroso. Uang itu setengahnya digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua DPP Partai Demokrat pada Kongres di Bandung Mei 2010.

Uang Rp 1 Miliar
Dalam penggeledahan yang dilakukan selama enam jam di kediaman Anas itu, penyidik KPK menyita uang tunai pecahan Rp 100 ribu senilai Rp 1 miliar.

Selain menggeledah rumah Anas, KPK juga menggeledah empat rumah pegawai PT Dutasari Citralaras. Masing-masing rumah Roni Wijaya (Direktur Keuangan) di Kemang Pratama Bekasi, rumah Sarto Dwi Atnon di Jl Arseno Cempaka Putih, dan rumah Budi Margono di Jl Al Barkah, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng. Penggeledahan di kediaman

Anas, disaksikan sendiri oleh Anas, Attiya, dan pengacaranya, Firman Wijaya. "Kata-tanya KPK geledah, sebagai penasihat hukum kita selalu transparan dan kooperatif. Termasuk bukti yang dibutuhkan kita serahkan ke KPK," kata Firman.

Anas tiba di rumahnya, sekitar 20 menit setelah penyidik KPK datang pada pukul 11.00 WIB. Attiya juga pulang begitu mendengar kabar KPK menggeledah rumahnya. Attiya sempat tertahan di gerbang, sebelum dipersilakan masuk sekitar pukul 13.15.

Firman Wijaya menegaskan, sebelumnya KPK tidak memberitahu akan ada penggeledahan. "Agak menyesalkan sikap KPK yang tidak memberi tahu kegiatan ini," ujar Firman.

Menurutnya, selama ini, Anas bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang ditangani KPK. Maka dari itu, dia berharap KPK juga harusnya bersikap terbuka dalam melakukan proses penyidikan yang melibatkan kliennya itu. "Selama ini kita kooperatif, tidak ada yang kita tutup-tutupi," katanya.

Pada penggeledahan tersebut, KPK menyita 10 gepok uang pecahan Rp 100 ribu senilai Rp 1 miliar. KPK bahkan harus mendatangkan mesin penghitung uang untuk menghitung pecahan Rp 100 ribu tersebut.

Mesin penghitung uang itu dibawa masuk seorang petugas KPK yang baru saja turun dari Innova hitam bernopol B 1704

UPR. Attiyah tidak menjawab pertanyaan wartawan soal alasan KPK melakukan penghitungan uang di rumahnya. "Nuwun sewu, Nuwun sewu (permisi)," kata Attiyah singkat.

Periksa SBY
Usai penggeledahan, PPI menggelar jumpa pers. Juru Bicara PPI, Ma'mun Murod, menjelaskan uang yang disita KPK adalah uang PPI untuk kegiatan setahun. Ia mengaku kecewa dengan penggeledahan yang dilakukan KPK. "KPK telah salah alamat menggeledah. Dalam surat itu, suratnya hanya (ditujukan) untuk istrinya Mas Anas," kata Ma'mun Murod.

Namun kenyataannya, Markas PPI ikut digeledah. "Uang milik PPI sebesar Rp 1 miliar dengan pecahan Rp 100 ribu dibawa KPK. Selain itu, Paspor milik Mbak Tia (istri Anas), Handphone, buku Yasin, dan arsip-arsip juga dibawa KPK," papar Ma'mun.

Kolega Ma'mun di PPI, Srimulyono, bahkan mencium aroma pesanan terkait penggeledahan di rumah Anas, yang merupakan Presidium PPI. "Penggeledahan ini biasanya ada seseorang yang pesan," kata Srimulyono daam konferensi pers PPI di Jakarta.

Ia menambahkan, penyidik KPK tak mengantongi izin secara resmi untuk melakukan penggeledahan. "Ini kan tidak ada hubungannya KPK dengan PPI, tidak ada izin dulu sebelumnya. Kalau izin dan kasih tahu ke kita, baru kita persilakan boleh apa tidak. Ini bentuk intimidasi dan represif," tegasnya.

Sambungan Hal. 1

PPI sempat membacakan surat untuk Anas dari seseorang yang mengaku sebagai pegawai di KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat bertulis tangan itu, berisi beberapa hal.

"Di antaranya, soal sprindik Anas yang bocor. Masalah bocornya sprindik, saya tersenyum, tapi hati saya terluka. Pak Anas, saya adalah pengagum Pak Anas. Dan di belakang Pak Anas banyak yang suport, dan kita siap mendukung perlawanan politik ini," tulis surat tersebut.

Surat juga menyebut Ketua Umm Demokrat, SBY. "Pak Anas, ada hal yang penting, saya informasikan. Di KPK itu ada surat pemeriksaan bendahara demokrat Nazaruddin. Di mana BAP nya tersebut, Nazaruddin melaporkan, di mana Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009," tulisnya lagi.

Ia menyebut, BAP tersebut sudah ditanda tangani Nazaruddin. Tapi, sampai sekarang tidak pernah diangkat KPK. Ia berjanji akan memberikan *soft copy* kepada Anas. Terkait SBY, Firman Wijaya menilai KPK tidak adil.

Dalam dakwaan terdakwa Dedy Kusdinar, Anas disebut menerima uang Rp 2,21 miliar untuk akomodasi selama Kongres Partai Demokrat di Bandung. "Kalau menyangkut kongres, Anas dan Pak SBY itu satu paket. Jadi yang adil saja pemeriksaanya. Kan tidak ada *special treatment* (perlakuan khusus) terhadap proses hukum," tegasnya. (tribunnews.com)